



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2023 – 2024
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke-	: 16
Jenis Rapat	: Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Rabu, 13 September 2023
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Penyesuaian RKA-K/L Tahun Anggaran 2024 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI dan Penetapan Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2024
Ketua Rapat	: Dr. Junimart Girsang, S.H.,MBA,M.H.,M.IP./Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dahliya Bahnan, S.H., M.H./Kabag Set. Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 24 (dua puluh empat) Anggota Komisi II DPR RI dari 47 (empat puluh tujuh) Anggota Komisi II DPR RI B. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI C. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara D. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara E. Kepala Lembaga Administrasi Negara F. Plt. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia G. Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Kepala Lembaga Administrasi Negara, Plt. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, dan Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia,

dengan agenda penyesuaian RKA K/L Anggaran 2024 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI dan Penetapan Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2024, hari Rabu, 13 September 2023, dibuka pukul 11.15 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dr. Junimart Girsang, SH< MBA, MH, M.IP., dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Kepala Lembaga Administrasi Negara, Plt. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, dan Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia, dengan agenda penyesuaian RKA K/L Anggaran 2024 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI dan Penetapan Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2024, sebagai berikut:

1. Menteri Pagu Anggaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) tahun 2024 sebesar **Rp463.382.824.000,-** (*empat ratus enam puluh tiga milyar tiga ratus delapan puluh dua juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah*), sudah termasuk pagu anggaran untuk Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN sebesar **Rp88.133.560.000,-** (*delapan puluh delapan milyar seratus tiga puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah*), dan penambahan anggaran hasil pembahasan di Badan Anggaran DPR RI untuk kenaikan gaji sebesar **Rp3.259.082.000,-** (*tiga milyar dua ratus lima puluh sembilan juta delapan puluh dua ribu rupiah*). Dengan demikian pagu alokasi anggaran Kementerian PANRB tahun 2024 menjadi sebesar **Rp466.641.906.000,-** (*empat ratus enam puluh enam milyar enam ratus empat puluh satu juta sembilan ratus enam ribu rupiah*), dengan pengalokasian anggaran per-program sebagai berikut:
 - a. Program Dukungan Manajemen: Rp268.771.207.000,-
 - b. Program Kebijakan, Pembinaan Profesi dan Tata Kelola ASN: Rp197.870.699.000,-

Dan menyampaikan usulan tambahan anggaran Kementerian PANRB sebesar **Rp87.200.080.000,-** (*delapan puluh tujuh milyar dua ratus juta delapan puluh ribu rupiah*).

2. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara menyampaikan Pagu Anggaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) tahun 2024 sebesar **Rp773.618.289.000,-** (*tujuh ratus tujuh puluh tiga milyar enam ratus delapan belas juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*), dan penambahan anggaran hasil pembahasan di Badan

Anggaran DPR RI untuk kenaikan gaji sebesar **Rp10.146.905.000,-** (*sepuluh milyar seratus empat puluh enam juta sembilan ratus lima ribu rupiah*). Dengan demikian pagu alokasi anggaran BKN tahun 2024 menjadi sebesar **Rp783.765.194.000,-** (*tujuh ratus delapan puluh tiga milyar tujuh ratus enam puluh lima juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah*), dengan pengalokasian anggaran per-program sebagai berikut:

- a. Program Dukungan Manajemen: Rp 729.499.855.000,-
 - b. Program Kebijakan, Pembinaan, Profesi, dan Tata Kelola ASN:
Rp 54.265.339.000,-
3. Kepala Lembaga Administrasi Negara menyampaikan Pagu Anggaran Lembaga Administrasi Negara (LAN) tahun 2024 sebesar **Rp304.332.249.000,-** (*tiga ratus empat milyar tiga ratus tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah*), dan penambahan anggaran hasil pembahasan di Badan Anggaran DPR RI untuk kenaikan gaji sebesar **Rp4.110.343.000,-** (*empat milyar seratus sepuluh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah*). Dengan demikian pagu alokasi anggaran LAN tahun 2024 menjadi sebesar **Rp308.442.592.000,-** (*tiga ratus delapan milyar empat ratus empat puluh dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah*), dengan pengalokasian anggaran per-program sebagai berikut:
- a. Program Dukungan Manajemen: Rp 247.778.552.000,-
 - b. Program Kebijakan, Pembinaan, Profesi, dan Tata Kelola ASN:
Rp 60.664.040.000,-

Dan menyampaikan usulan tambahan anggaran LAN sebesar **Rp71.937.155.000,-** (*tujuh puluh satu milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh lima ribu rupiah*).

4. Plt. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia menyampaikan Pagu Anggaran Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) tahun 2024 sebesar **Rp279.727.665.000,-** (*dua ratus tujuh puluh sembilan milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah*), dan penambahan anggaran hasil pembahasan di Badan Anggaran DPR RI untuk kenaikan gaji sebesar **Rp2.698.207.000,-** (*dua milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tujuh ribu rupiah*). Dengan demikian pagu alokasi anggaran ANRI tahun 2024 menjadi sebesar **Rp282.425.872.000,-** (*dua ratus delapan puluh dua milyar empat ratus dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*), dengan pengalokasian anggaran per-program sebagai berikut:

- a. Program Dukungan Manajemen: Rp 208.412.077.000,-
- b. Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional:
Rp 74.013.795.000,-

Dan menyampaikan usulan tambahan anggaran ANRI sebesar **Rp131.780.593.000,- (seratus tiga puluh satu milyar tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).**

5. Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia menyampaikan Pagu Anggaran Ombudsman Republik Indonesia (ORI) tahun 2024 sebesar **Rp247.570.830.000,- (dua ratus empat puluh tujuh milyar lima ratus tujuh puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)**, dan penambahan anggaran hasil pembahasan di Badan Anggaran DPR RI untuk kenaikan gaji sebesar **Rp1.270.277.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh d juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).** Dengan demikian pagu alokasi anggaran ORI tahun 2024 menjadi sebesar **Rp248.841.107.000,- (dua ratus empat puluh delapan milyar delapan ratus empat puluh satu juta seratus tujuh ribu rupiah)**, dengan pengalokasian anggaran per-program sebagai berikut:
 - a. Program Dukungan Manajemen: Rp 208.834.904.000,-
 - b. Program Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik:
Rp 40.006.203.000,-

Dan menyampaikan usulan tambahan anggaran ORI sebesar **Rp47.955.490.000,- (empat puluh tujuh milyar sembilan ratus lima puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).**

III. KESIMPULAN RAPAT

Kesimpulan Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Kepala Lembaga Administrasi Negara, Plt. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, dan Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia, dengan agenda penyesuaian RKA K/L Anggaran 2024 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI dan Penetapan Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2024, sebagai berikut:

1. Komisi II DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) tahun 2024 sebesar **Rp463.382.824.000,- (empat ratus enam puluh tiga milyar tiga ratus delapan puluh dua juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah)**, sudah termasuk pagu anggaran untuk Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN

sebesar **Rp88.133.560.000,-** (*delapan puluh delapan milyar seratus tiga puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah*), dan penambahan anggaran hasil pembahasan di Badan Anggaran DPR RI untuk kenaikan gaji sebesar **Rp3.259.082.000,-** (*tiga milyar dua ratus lima puluh sembilan juta delapan puluh dua ribu rupiah*). Dengan demikian pagu alokasi anggaran Kementerian PANRB tahun 2024 menjadi sebesar **Rp466.641.906.000,-** (*empat ratus enam puluh enam milyar enam ratus empat puluh satu juta sembilan ratus enam ribu rupiah*), dengan pengalokasian anggaran per-program sebagai berikut:

- a. Program Dukungan Manajemen : Rp268.771.207.000,-
 - b. Program Kebijakan, Pembinaan Profesi dan Tata Kelola ASN : Rp197.870.699.000,-
2. Komisi II DPR RI meminta Kementerian PANRB segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait dengan tunjangan kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI untuk ditingkatkan minimal menjadi 95%.
3. Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian PANRB untuk melakukan audit menyeluruh terkait data tenaga honorer/non ASN dengan melibatkan BKN dan BPKP sampai bulan Desember 2024.
4. Komisi II DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) tahun 2024 sebesar **Rp773.618.289.000,-** (*tujuh ratus tujuh puluh tiga milyar enam ratus delapan belas juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*), dan penambahan anggaran hasil pembahasan di Badan Anggaran DPR RI untuk kenaikan gaji sebesar **Rp10.146.905.000,-** (*sepuluh milyar seratus empat puluh enam juta sembilan ratus lima ribu rupiah*). Dengan demikian pagu alokasi anggaran BKN tahun 2024 menjadi sebesar **Rp783.765.194.000,-** (*tujuh ratus delapan puluh tiga milyar tujuh ratus enam puluh lima juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah*), dengan pengalokasian anggaran per-program sebagai berikut:
- a. Program Dukungan Manajemen : Rp 729.499.855.000,-
 - b. Program Kebijakan, Pembinaan, Profesi, dan Tata Kelola ASN : Rp 54.265.339.000,-
5. Komisi II DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Lembaga Administrasi Negara (LAN) tahun 2024 sebesar **Rp304.332.249.000,-** (*tiga ratus empat milyar tiga ratus tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah*), dan penambahan anggaran hasil pembahasan di Badan Anggaran DPR RI untuk kenaikan gaji sebesar

Rp4.110.343.000,- (empat milyar seratus sepuluh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah). Dengan demikian pagu alokasi anggaran LAN tahun 2024 menjadi sebesar **Rp308.442.592.000,- (tiga ratus delapan milyar empat ratus empat puluh dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah),** dengan pengalokasian anggaran per-program sebagai berikut:

- a. Program Dukungan Manajemen : Rp 247.778.552.000,-
- b. Program Kebijakan, Pembinaan, Profesi,
dan Tata Kelola ASN : Rp 60.664.040.000,-

6. Komisi II DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) tahun 2024 sebesar **Rp279.727.665.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah),** dan penambahan anggaran hasil pembahasan di Badan Anggaran DPR RI untuk kenaikan gaji sebesar **Rp2.698.207.000,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tujuh ribu rupiah).** Dengan demikian pagu alokasi anggaran ANRI tahun 2024 menjadi sebesar **Rp282.425.872.000,- (dua ratus delapan puluh dua milyar empat ratus dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah),** dengan pengalokasian anggaran per-program sebagai berikut:

- a. Program Dukungan Manajemen: Rp 208.412.077.000,-
- b. Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional:Rp 74.013.795.000,-

7. Komisi II DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Ombudsman Republik Indonesia (ORI) tahun 2024 sebesar **Rp247.570.830.000,- (dua ratus empat puluh tujuh milyar lima ratus tujuh puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah),** dan penambahan anggaran hasil pembahasan di Badan Anggaran DPR RI untuk kenaikan gaji sebesar **Rp1.270.277.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh d juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).** Dengan demikian pagu alokasi anggaran ORI tahun 2024 menjadi sebesar **Rp248.841.107.000,- (dua ratus empat puluh delapan milyar delapan ratus empat puluh satu juta seratus tujuh ribu rupiah),** dengan pengalokasian anggaran per-program sebagai berikut:

- a. Program Dukungan Manajemen: Rp 208.834.904.000,-
- b. Program Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik:
Rp 40.006.203.000,-

8. Terhadap usulan tambahan anggaran yang diajukan oleh :
a. Kementerian PANRB sebesar **Rp87.200.080.000,- (delapan puluh tujuh milyar dua ratus juta delapan puluh ribu rupiah);**

- b. LAN sebesar Rp71.937.155.000,- (*tujuh puluh satu milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh lima ribu rupiah*);
- c. ANRI sebesar Rp131.780.593.000,- (*seratus tiga puluh satu milyar tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah*);
- d. ORI sebesar Rp47.955.490.000,- (*empat puluh tujuh milyar sembilan ratus lima puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah*).

Komisi II DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran tersebut, dan meminta kepada Badan Anggaran DPR RI untuk menambahkannya ke dalam pagu alokasi anggaran (pagu definitif) tahun 2024 masing-masing kementerian/lembaga tersebut melalui pembahasan di Badan Anggaran DPR RI.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.28 WIB.

Jakarta, 13 September 2023

 KETUA RAPAT

Dr. JUNIMART GIRSANG, SH., MBA., MH., M.IP.

A-142